

ABSTRAK

Kekerasan pada anak merupakan permasalahan yang serius dan membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat segera ditangani. Kabupaten Serdang Bedagai mengalami peningkatan jumlah kasus kekerasan pada anak di tahun 2023 sejumlah 45 korban meskipun pemerintah sudah menetapkan Peraturan Daerah Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak. Peningkatan jumlah kasus tersebut disebabkan oleh adanya tekanan stigma sosial dari masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan pemerintah dalam mengatasi kekerasan pada anak serta faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana proses implementasi kebijakan dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Serdang Bedagai serta mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan melibatkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi terkait bagaimana implementasi kebijakan dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Serdang Bedagai. Penulis menggunakan teori sebagai landasan analisis adalah model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang berfokus pada Sumber daya, Komunikasi Antar Organisasi dan Lingkungan Sosial ekonomi dan politik. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kabupaten Serdang Bedagai belum berjalan secara optimal. Meskipun sudah ada regulasi dan program, seperti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 serta penyediaan layanan pengaduan, sosialisasi, dan rumah aman, masih banyak kendala yang menghambat pelaksanaan kebijakan. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan sumber daya, fasilitas pendukung seperti rumah aman masih belum tersedia secara permanen, Komunikasi antarinstansi belum sepenuhnya efektif dan terkoordinasi secara rutin, sehingga menyebabkan hambatan dalam proses penanganan kasus. Serta Faktor lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti adanya tekanan stigma sosial.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Kekerasan Anak, Perlindungan Anak